

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Agensi (*Agency Teori*)

Hubungan keagenan timbul di mana ada hubungan kerja antara satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan layanan. Teori keagenan membahas adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian manajemen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan mengenai konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga dapat memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).

Rankin *et al.* (2012: 135) menjelaskan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan memaksimalan utilitas yang berarti agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal, sehingga agen cenderung melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Eisenhardt (1989) menyimpulkan bahwa teori keagenan paling sering diterapkan pada fenomena organisasi seperti prinsipal (investor) dan agen (manajemen), yang menjadi permasalahannya adalah prinsipal tidak mempunyai jaminan kepercayaan bahwa agen akan bertindak sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh prinsipal menyukai ketika adanya pembagian deviden, namun berbeda dengan agen yang cenderung akan melaporkan laba perusahaan lebih rendah dari yang sebenarnya, karena satu dan lain hal seperti pembagian deviden yang dapat berdampak pada gaji atau tunjangan karyawan

#### 2.2 Audit

##### 2.2.1 Definisi Audit.

*International Standard on Auditing* (ISA) 200 menyatakan tujuan audit ialah untuk meningkatkan kepercayaan para investor terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. ISA 200 juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa risiko bawaan

dalam melaksanakan proses auditing, diantaranya adalah tentang *reasonable assurance* (asurans yang layak), *inherent limitation* (kendala bawaan), *audit scope* (lingkup audit), *material stattement* (salah saji material), dan *assertation* (asersi). Dalam ISA 200.15 membahas tentang pelaksanaan audit dimana dijelaskan bahwa auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan hal tersebut juga berkenaan dengan independensi auditor. Ketentuan yang dimaksud adalah seorang auditor memiliki skeptisime profesional, kearifan profesional, asurans yang layak, dan menggunakan tujuab sesuai ISAs yang relevan.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit berbasis ISA adalah melaporkan dan mengkomunikasikan apakah penyusunan laporan keuangan yang disiapkan klien telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dalam hal ini peran auditor independen sangat di butuhkan dalam menilai penyajian laporan keuangan sehingga terbebas dari salah saji material. Setelah itu auditor akan menentukan opini audit serta menjelaskan mengenai keputusan auditor memilih opini tersebut

Tuanakotta (2014:95) mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan proses audit yaitu:

1. *Risk Assesment*

Langkah yang dilakukan adalah menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan.

2. *Risk Response*

Dalam tahapan ini auditor merencanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi salah saji material.

3. *Reporting*

Pelaporan dilakukan dengan dua tahap yaitu merumuskan opini sesuai dengan bukti-bukti audit yang telah didapatkan. Kemudian mengkomunikasikan laporan keuangan dengan cara menerbitkan laporan auditan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan

### 2.2.2 Opini Audit

Opini audit adalah hasil akhir dari proses pengauditan laporan keuangan yang disampaikan oleh auditor (Fahmi *et al.*, 2017). Menurut standar audit 200 tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan para pengguna laporan keuangan, dengan pemberian opini oleh auditor mengenai laporan keuangan yang disusun. Standar akuntansi mengharuskan auditor memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan terbebas dari salah saji material.

Dalam merumuskan sebuah opini, auditor terlebih dahulu mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian, mengumpulkan bukti yang cukup, dan mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika laporan keuangan disusun dalam semua hal material maka auditor menyatakan opini tanpa modifikasi. Namun, jika penyajian laporan keuangan terdapat indikasi tidak wajar atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup maka auditor akan melakukan modifikasi opininya dalam laporan audit.

### 2.3 Auditor Switching

Menurut Jayanti (2014) *Auditor switching* adalah perpindahan auditor (Kantor Akuntan Publik) yang dilakukan perusahaan klien (*auditee*). Ketetapan mengenai *auditor switching* terdapat pada KMK nomor 359 tahun 2003 dalam pasal 2 yaitu tentang Jasa Akuntan Publik (Perubahan atas KMK nomor 423 tahun 2003). *Auditor switching* dilaksanakan dengan tujuan dapat mengatasi masalah independensi auditor dalam memberikan jasa kepada entitas klien.

*Auditor switching* dibagi menjadi dua yaitu *auditor switching mandatory* dan *auditor switching voluntary*. *Auditor switching mandatory* adalah pergantian auditor yang bersifat wajib karena adanya peraturan yang berlaku sehingga mewajibkan adanya pergantian auditor secara berkala sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk *auditor switching*

*voluntary* adalah pergantian auditor di luar ketentuan yang telah ditetapkan, yang didasari keinginan dari salah satu pihak karena berbagai alasan.

### **2.3.1 Peraturan Terkait Auditor Switching**

Indonesia memiliki ketetapan yang mengatur tentang *auditor switching* yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/MKM.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntansi Publik (Perubahan atas Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002). Auditor switching dilaksanakan dengan tujuan dapat mengatasi masalah independensi auditor dalam memberikan jasa kepada klien.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01.2008 Tentang Jasa Akuntansi Publik pasal 3 mengenai Pembatasan Masa Pemberian Jasa menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang AP paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dalam pasal 10 mengenai Pembatasan Jasa Audit menjelaskan bahwa akuntan publik memberikan jasa asuransi yang meliputi salah satu diantaranya adalah memberikan informasi keuangan historis, dimana untuk menjaga independensi auditor diberi batasan dalam memberikan jasanya bagi suatu entitas paling lama lima tahun buku berturut-turut, dan dapat memberikan kembali jasa audit setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa kepada entitas yang sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* dalam POJK No.13/POJK.03/2017 yang berisi pembatasan pemberian jasa audit oleh akuntan publik yang sama untuk jangka waktu tertentu. Menurut OJK seorang akuntan publik diberi batasan untuk mengaudit suatu entitas yang sama maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut, sedangkan kantor akuntan publik tidak dibatasi masa penggunaan jasanya, kembali lagi pada keputusan pihak perusahaan klien berdasarkan evaluasi dari komite audit.

#### **2.4 Potensi Kebangkrutan**

Potensi kebangkrutan adalah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan terancam likuidasi (Aroh *et al.*, 2017). Menurut Jayanti dan Rustiana (2015) potensi kebangkrutan merupakan kesulitan solvabilitas, dimana kewajiban perusahaan lebih besar dibandingkan dengan kekayaannya dan jika dibiarkan akan berakhir likuidasi. Laporan keuangan perusahaan dapat menunjukkan tanda-tanda perusahaan sedang mengalami masalah kesulitan keuangan (Kusuma dan Farida, 2019). Sebuah perusahaan yang tidak memiliki ketidakpastian dalam melanjutkan usahanya dan terancam bangkrut akan melakukan pergantian auditor untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan dengan menggandeng KAP dengan kualitas lebih tinggi (Rimadani, 2018). Perusahaan akan cenderung berpindah auditor jika sedang mengalami kesulitan secara finansial untuk mengurangi biaya audit (Santoso *et al.*, 2017). Perusahaan yang sedang berpotensi mengalami kebangkrutan yaitu perusahaan yang sedang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya seperti pembayaran utang, pinjaman bank, pajak dan lain sebagainya, sehingga mereka juga mengalami kesulitan dalam membayar fee audit sehingga cenderung memutuskan untuk berganti ke auditor dengan *fee* lebih rendah.

Posisi keuangan klien memiliki implikasi penting terhadap keputusan untuk mempertahankan atau melakukan pergantian KAP (Chadegani *et al.*, 2011). Menurut Setyorini dan Ardiati (2006) menyatakan bahwa potensi kebangkrutan termasuk kondisi kesulitan keuangan dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kesulitan likuiditas. Potensi kebangkrutan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis menggunakan model

springate yang dibuat pada tahun 1978, springate menggunakan 4 rasio keuangan untuk menghitung potensi kebangkrutan sebuah perusahaan (Purwanti, 2016).

## 2.5 Pergantian Manajemen

Menurut Nazri dan Ismail (2012) pergantian manajemen adalah perubahan tim manajemen seperti pergantian ketua dewan direksi, direktur pelaksana, dan ketua komite audit. Menurut Ruroh (2016) pergantian manajemen merupakan pergantian dewan direksi suatu entitas perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 dalam pasal 2 direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik. Pergantian komposisi direksi perusahaan dapat terjadi karena hasil keputusan RUPS selain itu dapat diakibatkan pula oleh pengunduran diri dewan direksi. Adanya pergantian manajemen dilakukan dengan harapan dewan direksi yang baru dapat membawa dampak besar bagi perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan sesuai yang diharapkan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi mengungkapkan bahwa manusia memiliki sifat yang cenderung mementingkan diri sendiri. Masalah keagenan ini dapat menjadi pemicu prinsipal untuk melakukan pergantian manajemen. Prinsipal memiliki hak untuk menentukan orang yang tepat untuk memimpin perusahaan dan bekerja sesuai apa yang diinginkan prinsipal. Pergantian manajemen mendorong dilakukannya *auditor switching* dengan memiliki KAP yang dianggap lebih kompeten (Kusuma dan Farida, 2019). Menurut Nazri dan Ismail (2012) terdapat hubungan yang kuat antara perubahan manajemen dan kecenderungan untuk mengubah auditor. Pemangku kepentingan menganggap salah satu penyebab gagalnya perusahaan dalam mencapai suatu tujuan adalah disebabkan oleh kelemahan manajemen. Sehingga para pemangku kepentingan menuntut adanya adanya perubahan manajemen sebagai bentuk perbaikan kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan

tersebut (Ferdinandus, 2015). Menurut hasil penelitian Manto dan Manda (2018) jika pergantian manajemen mengalami peningkatan maka akan diikuti juga oleh peningkatan *auditor switching*.

Indikator pergantian manajemen dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan pada direktur utama yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika presiden direktur pada laporan keuangan berbeda dari tahun sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan pergantian manajemen.

## 2.6 Afiliasi KAP

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 dalam pasal 1 menyatakan bahwa KAP merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kantor akuntan publik *big four* beroperasi dalam struktur organisasi yang terdesentralisasi, sehingga memungkinkan para anggota dapat mengembangkan pengetahuan dengan lebih baik (Michael Yu, 2007). Dalam penelitiannya Michael Yu (2007) menyatakan bahwa KAP *big four* dapat memberikan audit berkualitas lebih tinggi daripada KAP *non big four*. Hal tersebut dikarenakan KAP *big four* memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih baik. Oleh karena KAP *big four* memiliki skala yang cukup besar dan terorganisir dengan baik maka tidak heran bila performa yang diberikan juga lebih baik dalam menilai laporan keuangan dan pemberian opini. Perusahaan cenderung akan menggunakan KAP afiliasi *big four* dengan tujuan meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata pelaku pangsa pasar (Damayanti dan Sudarma, 2008).

Kantor akuntan publik berafiliasi *big four* dianggap lebih kompeten dan akurat dalam mendeteksi adanya salah saji serta menentukan asumsi kelangsungan hidup usaha klien.

Perusahaan terutama yang sedang berkembang ingin meningkatkan kredibilitas laporan auditan mereka cenderung melakukan pergantian auditor ke KAP *Big Four* (Wijani & Januarti, 2011).

KAP Big Four yang berafiliasi dengan KAP Indonesia adalah sebagai berikut:

1. KAP Osman Bing Satrio & Eny : Deloitte Touche Tohmatsu
2. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan : PricewaterhouseCoopers (PwC)
3. KAP Purwantono, Sungkoro, Surja : Ernst & Young (EY)
4. KAP Siddharta, Widjaja & Rekan : KPMG

Indikator afiliasi KAP dapat dilihat dari laporan auditor independen dalam laporan keuangan tahunan. Afiliasi KAP menggunakan variabel *dummy*. Jika KAP afiliasi dengan KAP *Big Four* maka diberi kode 1, sebaliknya jika perusahaan di audit oleh *non Big Four* maka diberi kode 0.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sinarwati (2010) penelitian ini menggunakan variabel independen *opini going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan kesulitan keuangan penelitian ini menggunakan BEI sebagai objek penelitiannya. Dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perubahan manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan *opini going concern* dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijani dan Januarti (2011) variabel independen yang digunakan adalah pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, penurunan persentase ROA, ukuran KAP, dan ukuran klien. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan regresi logistik. Hasil yang diperoleh adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pergantian



auditor adalah pergantian manajemen dan ukuran KAP. Variabel lainnya yaitu opini audit, *financial distress*, perubahan persentase ROA, dan ukuran klien tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian Suryandari (2013) dengan variabel independen pergantian manajemen, reputasi KAP, *financial distress*, *opini audit going concern*, dan ukuran perusahaan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *financial distress* dan *opini audit going concern* berpengaruh signifikan terhadap auditor switching, sedangkan variabel pergantian manajemen, reputasi KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2014) menggunakan teknik analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pergantian manajemen dan *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan opini audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian Farisi Iman Shah (2019) yang berjudul dengan menggunakan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap *auditor switching* adalah ukuran KAP, sedangkan *financial distress* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan penelitian terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Mengapa Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik	Sinarwati (2010)	Variabel dependen: Y: Pergantian Kantor Akuntan Publik Variabel independen: X1: <i>Opini going concern</i> X2: Pergantian manajemen	<i>Opini going concern</i> dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Perubahan manajemen dan kesulitan

		X3: Reputasi auditor X4: Kesulitan keuangan	keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan <i>Auditor Switching</i>	Wijani dan Januarti (2011)	Variabel dependen: Y: <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen: X1: pergantian manajemen X2: Opini audit X3: <i>Financial distress</i> X4: Penurunan persentase ROA X5: Ukuran KAP X6: Ukuran klien	Perubahan manajemen dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Opini audit, <i>financial distress</i> , penurunan persentase ROA dan ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
Faktor Klien dan Faktor Auditor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan <i>Auditor Switching</i>	Suryandari (2013)	Variabel dependen: Y: <i>Auditor Switching</i> Variabel independen: X1: Pergantian manajemen X2: Reputasi KAP X3: <i>Financial distress</i> X4: <i>Opini audit going concern</i> X5: Ukuran perusahaan	Variabel <i>financial distress</i> dan <i>opini audit going concern</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Variabel lainnya yaitu pergantian manajemen, reputasi KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Pergantian Manajemen,	Salim dan Rahayu (2014)	Variabel dependen: Y: <i>Auditor Switching</i>	Pergantian manajemen dan <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>auditor</i>

<i>Financial Distress Terhadap Auditor Switching</i>		Variabel independen: X1: Opini audit X2: Ukuran KAP X3: Pergantian manajemen X4: <i>Financial Distress</i>	<i>switching</i> , sedangkan opini audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap <i>Auditor Switching</i>	Farisi Ilman Shah (2019)	Variabel dependen: Y: <i>Auditor switching</i> Variabel independen: X1: <i>Financial Distress</i> X2: Ukuran KAP X3: Ukuran perusahaan	Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan <i>financial distress</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Potensi Kebangkrutan Terhadap *Auditor Switching*

Potensi kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang menjurus ke arah kebangkrutan dan dapat mengakibatkan perusahaan tersebut di likuidasi. Perusahaan dengan status potensi kebangkrutan memiliki angka kewajiban yang lebih besar dibandingkan kekayaan yang dimiliki. Bilamana entitas tidak menunjukkan adanya kemajuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang maka jalan akhir yang ditempuh adalah melikuidasi perusahaan tersebut, kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab putusnya hubungan perikatan antara perusahaan dengan KAP (Rimadani, 2018).

Menurut penelitian Setyorini dan Ardiati (2006) potensi kebangkrutan perusahaan mendorong adanya pergantian auditor karena pihak manajemen tidak puas dengan kinerja atau pendapat auditor. Sedangkan menurut Budisantoso *et al.*, (2017) perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching ketika mengalami kesulitan secara finansial untuk mengurangi biaya audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP. Begitu pula dengan hasil penelitian Suryandari (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami potensi kebangkrutan cenderung mengganti auditor mereka untuk meningkatkan subjektivitas klien. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruroh (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam potensi kebangkrutan tidak mampu untuk membayar *fee audit*, sehingga perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan cenderung tidak melakukan pergantian auditor dibandingkan perusahaan yang terbebas dari kesulitan keuangan. Hasil penelitian Wijani dan Januarti (2010) menyatakan perusahaan yang dengan potensi kebangkrutan tidak mengganti auditor mereka karena memperhatikan persepsi para pemegang saham yang beranggapan bahwa perusahaan yang sering melakukan auditor switching akan menimbulkan tanggapan negatif dari investor. Serta penelitian Astuti dan Ramantha (2014) yang menunjukkan bahwa potensi kebangkrutan tidak menjadi faktor penyebab perusahaan untuk melakukan pergantian KAP karena auditor yang baru akan mencari histori tentang kondisi financial perusahaan, dengan demikian opini yang didapat dari kondisi keuangan perusahaan akan sama. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara prediksi kebangkrutan terhadap pergantian auditor. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

### **2.8.2 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching***

Menurut Nazri dan Ismail (2012) pergantian manajemen adalah perubahan tim manajemen seperti pergantian ketua dewan direksi, direktur pelaksana, dan ketua komite audit. Pergantian komposisi direksi perusahaan dapat terjadi karena hasil keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) selain itu dapat diakibatkan pula oleh pengunduran diri dewan direksi. Terjadinya perubahan manajemen dapat berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi perusahaan tersebut serta pemilihan KAP yang baru (Ruroh, 2016). Manajemen yang baru mungkin tidak puas dengan kualitas auditor yang lama, serta menginginkan KAP yang sudah dikenal dan dapat diajak bekerja sama (Nazri dan Ismail, 2012). Manajer baru ingin menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa manajemen perusahaan sedang diawasi oleh auditor yang memiliki kredibilitas tinggi. Manajemen baru memiliki kewajiban untuk membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu untuk menunjukkan dan mencapai kinerja yang lebih baik, salah satunya adalah putusan untuk mengganti auditor.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) menyatakan bahwa pergantian manajemen baru berpengaruh terhadap *auditor switching*. Keinginan manajemen baru untuk melakukan *auditor switching* bergantung pada kekuatan harapan agar dapat bekerja sama dengan KAP yang baru. Penelitian Wijani & Januarti (2011) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu ketika terjadi pergantian manajemen maka akan diikuti oleh pergantian auditor. Manajemen baru menginginkan KAP yang dapat mengikuti perkembangan perusahaan dan berkualitas tinggi, serta adanya pergantian manajemen ini memiliki pengaruh terhadap manajemen untuk melakukan kebijakan *auditor switching* (Ruroh, 2016). Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryandari (2013) yang menyatakan tidak adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan *auditor switching*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara prediksi kebangkrutan terhadap pergantian auditor. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching***

### 2.8.3 Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap *Auditor Switching*

KAP diklasifikasikan menjadi KAP besar dan KAP kecil (Gul, 1989; Suyono *et al.*, 2013). Menurut Francis & Yu (Carcello *et al.*, 1992) kantor akuntan publik yang besar yaitu KAP *Big Four* memiliki struktur organisasi yang terdesentralisasi hal tersebut memungkinkan mereka mampu mengembangkan potensi para staf, serta klien yang dapat memperoleh pengetahuan serta keyakinan yang lebih besar terhadap keahlian akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien.

KAP besar dipercaya dapat memberikan kualitas audit yang baik secara menjadi nilai tambah perusahaan karena di audit oleh KAP bereputasi tinggi (Shah, 2019). Menurut Ali & Aulia (Lennox, 1999) KAP besar mampu untuk memberikan *performance* yang lebih baik dengan kemampuan mendeteksi tanda-tanda kecurangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam opini auditnya. Perusahaan cenderung akan menggunakan KAP afiliasi *Big Four* dengan tujuan meningkatkan kredibilitas laporan tahunan perusahaan tersebut (Restian *et al.*, 2017).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijani dan Januarti (2011) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, perusahaan klien akan lebih memilih KAP berafiliasi *Big Four* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Shah (2019) menyatakan reputasi baik yang di miliki oleh KAP besar membuat para investor lebih mempercayai hasil yang di berikan KAP afiliasi *Big Four*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim & Rahayu (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena *fee* auditor yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* terlalu besar sehingga perusahaan cenderung akan memilih KAP kecil atas pertimbangan *fee* audit yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran KAP dengan *auditor switching*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* memiliki

kemungkinan kecil untuk berpindah ke KAP *non Big Four*. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching***

